DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK (SMAKI SANTO YOSEPH SANGATTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK.

: a. bahwa dalam rangka mempersiapkan siswa-siswi menjadi

anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Agama Katolik dan/atau menjadi ahli ilmu Agama Katolik, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK);

b. bahwa SMAK Santo Yoseph Sangatta di Kabupaten Kutai Timur - Kalimantan Timur, memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar SMAK:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu memberikan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar jenjang

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 3. Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54101:
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157): 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2013 tentang Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Nomor 712):

Kabag ORTALA	Direktur	Sekretaris Ditjen
dan Kepegawajan	Pendidikan Kasolik	Biman Katolik
1	*	4

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Bertia Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592 sebagaimana telah ditubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Dertia Negara Republik Indonesia Tahun 2013) Nomor Obertia Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor Dertia Negara Negar
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 177);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUS/ MASYARA/

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK (SMAK) SANTO YOSEPH SANGATTA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR – KALIMANTAN TIMUR.

KESATU

Memberikan izin operasional kepada SMAK Santo Yoseph Sangatta di Kabupaten Kutai Timur – Kalimantan Timur untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah mulai tahun pelajaran 2014/2015.
SMAK Santo Yoseph Sangatta mengembangkan program

keagamaan Katolik dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan Program Keagamaan Katolik SMAK harus memperhatikan Kurikulum Program Keagamaan Katolik

Tangkat Menergah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jain opensaiseal ini berlaku sementara dan dapat ditinjuu kembali serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap SARK Santo Yoseph Sangatta di Kabupaten Kutai Timur - Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Ditjen Binas Katolik Kementerian Agama Hi sesuai ketentuan yang berlaku: Kepala SMAK Santo Yoseph Sangatta wajib mendafarkan siswa-siswi dan memberlikan laporan setiap semester kepada

KELIMA

Direktur Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama RI. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.

Kabag ORTALA	Direktur	Sekretaris Ditjen
Ian Kepegawaian	Pendidikan Katolik	Timan Katolik
1	*	6

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2014 BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



Tembusan:

- 1. Menteri Agama, Jakarta:
- 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta; 4. Uskup Keuskupan Agung Samarinda, Samarinda;
- 5. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda ;
- 6. Ketua DPRD Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda; 7. Bupati Kabupaten Kutai Timur, Sangatta;
- 8. Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Kutai Timur, Sangatta;
- 9. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama, Jakarta; 10. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda;
- 11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur, Sangatta;
- 12. Kepala SMAK Santo Yoseph Kabupaten Kutai Timur, Sangatta.

Kahag ORTALA	Direktur	Sekretaris Ditjen
dan Kepegawaian	Pendidikan Katolik	Dimas Ketobk
+	*	h